

## Mengarusutamakan Pemerintahan Cergas melalui Aplikasi SiBakul Jogja selama Masa Pandemi COVID-19

### *Mainstreaming Agile Governance through the SiBakul Jogja Apps during the COVID-19 Pandemic*

Ahmad Syafiqurrohman<sup>1\*</sup>, Muhammad Eko Atmojo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

\*Email Korespondensi: [Ahmad.Syafiqurrohman1@gmail.com](mailto:Ahmad.Syafiqurrohman1@gmail.com)

Diterima: 8 Januari 2023

Direvisi: 15 Mei 2023

Disetujui: 30 Juni 2023

DOI: [10.35967/njip.v22i1.395](https://doi.org/10.35967/njip.v22i1.395)

**Abstrak:** Pandemi COVID-19 berimbas terhadap berbagai sektor salah satunya adalah sektor perekonomian yang di dalamnya terdapat UMKM. Inovasi Pemerintah dibutuhkan guna menjembatani UMKM agar mampu bertahan di tengah krisis Pandemi COVID-19 salah satunya melalui platform SiBakul Jogja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait penerapan platform SiBakul Jogja melalui perspektif *Agile Governance* sebagai inovasi dari Pemerintah Provinsi DIY. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan studi kasus. Teknik Pengumpulan Data dengan triangulasi, yakni wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiBakul Jogja memiliki sebuah sistem yang mencerminkan penerapan *Agile Governance* sebagai salah satu inovasi Diskop UKM DIY. Beberapa di antaranya *Business Driven* yang dikembangkan bersamaan dengan pembaharuan sistem yang berkaitan dengan *Systematic and Adaptive Approach*. Namun, SiBakul Jogja juga masih memiliki kelemahan dalam hal responsivitas dari keluhan masyarakat terutama dalam sistem SiBakul Jogja yang berkaitan dengan *Human Focused*. Melalui berbagai macam fitur yang dimilikinya guna memudahkan penyatuan data KUMKM, nyatanya tidak semua fitur dapat berfungsi secara maksimal. Padahal, salah satu fiturnya, yakni MarketHub dan Galeri Pasar Kotagede YIA memiliki *traffic* yang tinggi dikarenakan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menggambarkan bahwasanya SiBakul Jogja sebagai inovasi Pemerintah belum secara utuh mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang *agile* (*Agile Governance*).

**Kata Kunci:** SiBakul Jogja; UMKM; inovasi; *Agile Governance*.

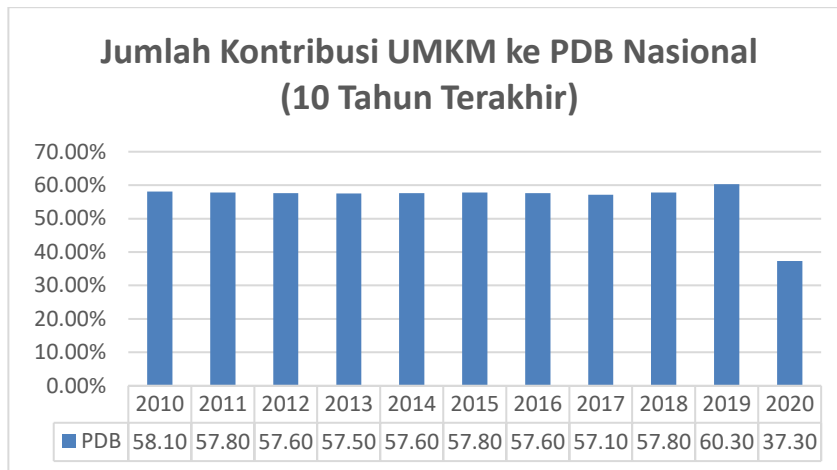
**Abstract:** The COVID-19 pandemic has affected various sectors, one of which is the economic sector, which includes MSMEs. Government innovation is needed to bridge MSMEs so they can survive amid the COVID-19 Pandemic crisis, one of which is through the SiBakul Jogja platform. The purpose of this study is to examine the implementation of the SiBakul Jogja platform through an agile governance perspective as an innovation from the DIY Provincial Government. The research method used is a qualitative case study approach. Data collection techniques with triangulation, namely interviews and documentation. The results of the study show that SiBakul Jogja has a system that reflects the application of Agile Governance as one of the DIY UKM Diskop innovations. Some of them are Business Driven which were developed concurrently with system updates related to the Systematic and adaptive approach. However, SiBakul Jogja still has weaknesses in terms of responsiveness from public complaints, especially in the SiBakul Jogja system which is related to Human Focused. Through its various features to facilitate KUMKM data integration, in fact not all features can function optimally. In fact, one of its features, namely MarketHub and the Kotagede YIA Market Gallery, has high traffic because it is close to people's needs. The conclusion of this study illustrates that SiBakul Jogja as a Government innovation has not been fully capable of implementing agile governance.

**Keywords:** SiBakul Jogja; MSMEs; innovation; *Agile Governance*.

## Pendahuluan

Pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai macam dinamika permasalahan di Indonesia yang tidak hanya berimbas terhadap sektor kesehatan, melainkan juga berdampak terhadap sektor ekonomi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang sering disebut sebagai UMKM merupakan salah satu

bentuk dari pergerakan perekonomian produktif oleh masyarakat (Sari, 2020). UMKM itu sendiri tidak dapat diklasterisasikan hanya dalam satu jenis saja, melainkan terdapat beberapa perbedaan mendasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Salah satu produk kebijakan terbaru terkait UMKM di antaranya diatur dalam UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang tertera dalam pasal 86, pasal 87, pasal 88, pasal 89, pasal 90, pasal 91, pasal 93, pasal 94, pasal 104 dan pasal 185 huruf b yang kemudian diimplementasikan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Sumampouw et al., 2021). Dinamika kebijakan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan stimulasi kemudahan bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya.



**Gambar 1.** Jumlah Kontribusi UMKM ke PDB Nasional  
 Sumber: Situs Web KemenkopUMK, 2021

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia didominasi oleh UKM (Usaha Kecil dan Mikro) yang secara nasional berjumlah 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari jumlah keseluruhan sektor usaha (Bahtiar, 2021). Dari banyaknya jumlah tersebut beberapa keuntungan selain membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat juga berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Seperti yang tertera pada **Gambar 1** di atas bahwasanya sepanjang kurun waktu 9 tahun terakhir (2010-2019) Kontribusi UMKM terhadap PDB memiliki angka yang relatif stabil dan bahkan meningkat di setiap tahunnya. Peningkatan drastis terjadi pada tahun 2019 di mana kontribusi UMKM kepada PDB mencapai angka 60,30% sekaligus menjadi rekor terbaru yang membanggakan. Tetapi, hadirnya Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar di mana kontribusi UMKM terhadap PDB menurun drastis hingga *merengsek* ke angka 37,30% (Kemenkopukm.go.id, 2021).

Survei BPS yang dilakukan untuk mengukur terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaku usaha pada tahun 2020 berhasil mengumpulkan 34.599 responden dengan jumlah responden pada bidang UMK, yakni 25.526. Hasil survei tersebut menghasilkan bahwasanya 33,23 % UMK melakukan pengurangan jumlah terhadap pegawainya dan penurunan pendapatan hingga 84,20% (bps.go.id, 2020). Hal tersebut senada dengan survei yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY bersama JERCOVID-19 bahwasanya pendapatan UMKM di DIY menurun hingga 80%. Bahkan, sekitar 44% UMKM di DIY juga melakukan *lay-off* atau menekan jumlah pekerja dengan merumahkan beberapa pegawainya dikarenakan penurunan pendapatan yang cukup ekstrem (Evani, 2020). Respons Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terkait kolapsnya UMKM kemudian dirumuskan kedalam sebuah Surat Edaran Gubernur tertanggal 14 Mei 2020 Nomor 519/7669 Tentang Himbauan Pembelian Produk UMKM di Wilayah DIY. Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang cergas (*Agile Governance*) menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan inovasi yang cepat serta adaptif dalam situasi dan kondisi masyarakat seperti saat ini (Hulu et al., 2020). Dengan adanya sebuah

tatakelola yang *responsive* dan *agile*, maka pemerintah dapat dengan segera mencetuskan terobosan yang inovatif bagi sektor-sektor terdampak di masyarakat terutama di tengah krisis multidimensi Pandemi COVID19 (Zulyani & Meiwanda, 2020). Terobosan inovasi tersebut juga perlu diimbangi oleh konsep yang matang dengan merumuskan terlebih dahulu *innovation-hub* yang memungkinkan Inovasi yang tercipta dapat sesuai dengan RPJMD ataupun RKPD serta kolaborasi multisektor oleh Provinsi DIY sehingga dapat mewujudkan kualitas Inovasi yang mutakhir (Saksono, 2020). Sehingga Pemerintah Provinsi DIY mampu dan memiliki kemauan untuk menggebrak kebiasaan lama (tradisional) yang tidak produktif dalam menciptakan terobosan baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Mulyanto, 2020). Salah satu keuntungan dari terciptanya Inovasi yang berdampak adalah makin mendekatkan Provinsi DIY untuk secara faktual melaksanakan pelayanan publik secara efisien (Farikhah, 2020). Oleh karena itu, salah satu yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah Inovasi Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha Jogja (SiBakul Jogja). SiBakul Jogja merupakan Inovasi yang diinisiasi oleh Dinkop UKM DIY yang sudah dirilis pada tahun 2019 silam (Alfin, 2021). Inovasi menjadi sebuah wujud penting yang diberikan oleh Pemerintah guna menjamin adanya jawaban dari setiap tantangan yang hadir (Melinda et al., 2020). Tujuan dari adanya inovasi pembentukan SiBakul Jogja ini adalah sebagai wadah pembinaan dan koperasi bagi pemilik UMKM di Provinsi DIY itu sendiri yang hingga saat ini sudah berjumlah 1.219 Pemilik Usaha yang bergabung (Husa, 2020). Kemudian, hal yang menarik dari SiBakul Jogja adalah baru-baru ini masuk Top 40 Inovasi Pelayanan publik berdasarkan Keputusan MenPAN-RB Nomor 1024 Tahun 202 (Fridayani & Chiang, 2022). Walaupun di Provinsi DIY terdapat banyak inovasi pelayanan publik namun yang menjadi salah satu inovasi dengan keunggulan serta kedekatan dengan UMKM adalah inovasi SiBakul Jogja. SiBakul Jogja memiliki beberapa layanan seperti Markethub Free Ongkir, Galeri Pasar Kota Gede YIA, Layanan Data KUKM, Kesehatan Koperasi, Aplikasi Manajemen Koperasi, Aduan Anggota Koperasi, Desapreneur. Dari beberapa layanan tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwasanya posisi SiBakul Jogja merupakan sebuah inovasi yang strategis bagi UKM pascapandemi COVID-19.

Inovasi SiBakul Jogja menjadi salah satu analisis yang menarik apabila dilihat dari kacamata *agile governance*. Konsep *agile* tersebut awalnya memang dilaksanakan terlebih dahulu pada sektor perusahaan swasta terkait dengan kecepatan dan ketepatan inovasi yang diberikan (Kurniawan et al., 2020). Makin berkembangnya waktu, konsep *agile governance* juga perlu diadopsi bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lainnya dengan penyesuaian kebutuhan serta memperhatikan kepuasan masyarakat terkait kualitas pelayanan publik (Rivelino, 2022). Oleh karena itu, apa bila dikaitkan terhadap kajian *agile governance* salah satu penulis masyhur dkk. (2015) berpendapat bahwasanya *agile governance* merupakan sebuah kemampuan dari *human societies* yang dapat menciptakan inovasi dengan beradaptasi secara cepat, tepat dan berkelanjutan sesuai dengan keadaan lingkungan terkini (Vernanda, 2019). Terdapat 6 prinsip dalam menjalankan *Agile Governance* menurut di antaranya *Good enough governance*, *Business-driven*, *Human focused*, *Based on quick wins*, *Systematic and Adaptive approach*, dan *Simple design and continuous refinement* (Luna et al., 2015). *Agile governance* menjadi sebuah konsep yang digaungkan akhir-akhir ini sehingga *novelty* dari penelitian ini bahwasanya khazanah penelitian terkait *agile governance* masih sangat minim dan perlu untuk dikembangkan secara lebih luas.

## **Metode**

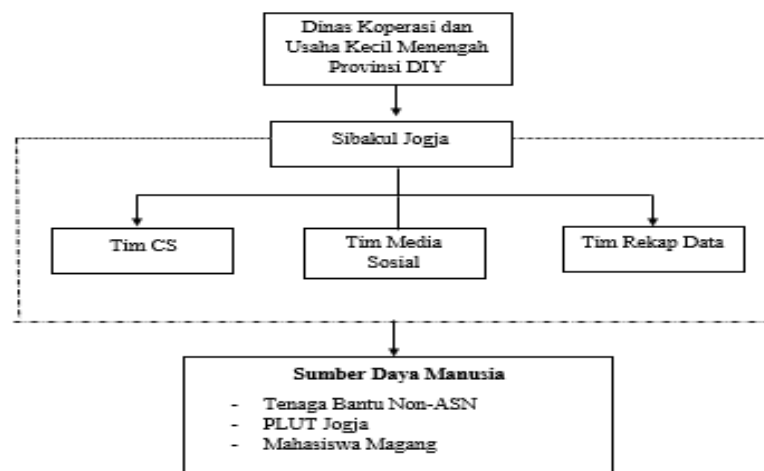
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus untuk menganalisis seputar *platform* SiBakul Jogja sebagai salah satu Inovasi dari Dinas Koperasi dan UKM di Provinsi DIY. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan Studi Kasus yang menurut Cresswell merupakan sebuah penelitian intensif yang mengkaji satu kasus tertentu atau lebih (perbandingan) ataupun sebuah keputusan tertentu atau lebih (perbandingan) dengan melibatkan berbagai macam data baik itu wawancara, dokumentasi, dokumen, rekaman audio-visual guna mendapatkan jawaban secara utuh dari sebuah kasus yang menjadi fokus peneliti (Al-hamdi et al.,

2020). Teknik pengambilan data adalah dengan menggunakan triangulasi data, yakni wawancara (*Indepth interview*) dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY melalui Kepala Layanan Usaha Terpadu, Koordinator PLUT sekaligus Koordinator SiBakul Jogja, Koperasi Jogja Karya Nyawiji (JKN) dan UMKM SiBakul Jogja yang tersebar di Provinsi DIY dan mendokumentasikan pelaksanaan SiBakul Jogja melalui dokumen resmi seperti Laporan Tahunan SiBakul Jogja tahun 2020 dan 2021. Guna memperkaya perolehan data, penelitian ini juga merangkum beberapa informasi secara sekunder melalui sosial media dan situs web resmi dari Diskop UKM DIY. Teknik Analisis Data dilaksanakan dengan *interactive model*, yakni: a) Pengumpulan Data, b) Reduksi Data, c) Penyajian Data dan d) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2019).

## Hasil dan Pembahasan

### Prinsip *Good Enough Governance* dalam Pengelolaan SiBakul Jogja

Bagian ini akan lebih membahas mengenai tata kelola secara Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Teknis (SDT) dari *platform* SiBakul Jogja. Sejak diresmikannya SiBakul Jogja pada 12 November 2019 melalui Surat Edaran Nomor 518/15213 Tentang Sistem Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha Berdaya Saing Khas Orang Jogja (Sibakul Beringharjo) banyak sekali hal yang menarik untuk dikaji. Perlu diketahui, bahwasanya penyelenggaraan SiBakul Jogja efektif terlaksana dimulai dari awal tahun 2020, yakni bulan Januari dikarenakan pada bulan sebelumnya SiBakul Jogja masih dalam proses persiapan. Secara analisis Sumber Daya Manusia, Surat Perintah Tugas Tim SiBakul Jogja sebetulnya memiliki fungsi utama untuk menyosialisasikan serta mengintegrasikan Data Koperasi dan UMKM di Provinsi DIY. Tetapi, dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola SiBakul Jogja, maka pengelolaan secara teknis diampu oleh Tenaga NonASN PLUT DIY yang merupakan organisasi di bawah dari Diskop UKM DIY tepatnya di bawah bidang UMKM dengan 19 anggota di dalamnya sebagaimana pada [Gambar 2](#).



**Gambar 2.** Bagan Pengelolaan SiBakul Jogja

Sumber: Hasil Wawancara, Data Diolah Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator PLUT Jogja, peneliti merangkum pembagian penugasan SiBakul Jogja melalui 3 tim yang terdiri dari Tim CS, Tim Media Sosial dan Tim Rekap Data seperti yang tertera pada [Gambar 2](#) di atas. Ketiga tim tersebut pada awalnya (November 2019-Maret 2021) dikelola oleh Tenaga Bantu Non-ASN, Bidang Kewirausahaan Diskop UKM DIY dan PLUT Jogja. Beberapa tim yang telah ditetapkan melalui Surat Penugasan di atas kemudian juga diberikan penugasan secara eksternal (seperti sosialisasi dan pengenalan SiBakul Jogja) selain menjadi Koordinator PLUT Jogja. Tentu hal tersebut sangat disayangkan dikarenakan untuk mengelola secara teknis SiBakul Jogja baik itu internal maupun eksternal memerlukan SDM yang relatif banyak serta

mumpuni dan tidak dapat hanya ditumpukan pada 1 atau 2 orang dalam tim saja (Lisongwei, 2023). Namun, beberapa waktu kemudian Pemerintah Provinsi DIY memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk menambah jumlah SDM hingga terdapat 12 orang Tim Kurasi Produk dan 7 di antaranya bertugas sebagai *call service* (CS). Tim Kurasi Produk bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap UMKM yang mendaftar SiBakul Jogja seperti *packaging*, perizinan dan pembukuan. Sedangkan CS bertugas untuk mengelola jalannya pemesanan hingga pengantaran produk SiBakul Jogja hingga kepada konsumen. Berdasarkan data di Tahun 2021, dari 301.426 UMKM hanya 14.309 yang mengikuti program SiBakul Jogja UKM, 1.965 mengikuti program MarketHub UMKM dan 408 UMKM Pasar Kotagede (Galeri YIA). SiBakul Jogja perlu merumuskan strategi agar masyarakat dapat mengenal serta ikut mempromosikan sehingga mempersempit *gap* antara jumlah UMKM dan yang sudah mengikuti program. Pengelolaan yang optimal tentu akan berdampak terhadap hasil yang optimal juga sehingga Diskop UKM DIY perlu untuk dengan rutin melaksanakan evaluasi internal dan perumusan program yang *update*.

### Penerapan Prinsip *Business Driven* dalam SiBakul Jogja Bagi UMKM

Prinsip *business driven* mengkaji terkait sebuah inovasi yang keberadaannya dapat saling menguntungkan antara Pengguna, UMKM dan Penyedia Jasa (Ekspedisi). Untuk mempermudah kerja sama SiBakul Jogja dengan pihak lain, maka dikerjasamakan dengan metode swakelola tipe-3, yakni dengan Organisasi Masyarakat yaitu antara Diskop UKM DIY dengan Koperasi Java Parama Niaga (JPN). Melalui kerja sama dengan JPN, maka JPNlah yang melaksanakan kolaborasi dengan beberapa mitra yang mempermudah baik itu dalam proses pengiriman, pengembangan dan pengelolaan. Kerja sama pertama kali dilaksanakan dengan mitra Grab yang setelah program berjalan pada tahun 2020 di 3 hari pertama kemudian terdapat peningkatan, yakni pada hari pertama di 16 Mei 2020 terdapat 9 order, 17 Mei 2020 terdapat 27 order dan 18 Mei 2020 terdapat 45 order. Sepanjang tahun 2020 kegiatan transaksi UMKM melalui fitur MarketHub dan Galeri Pasar Kotagede YIA mengalami peningkatan walaupun masih terdapat *gap* antara 187 UMKM yang melakukan transaksi dengan 732 UMKM yang belum melaksanakan transaksi. Perincian transaksi yang dilakukan apabila dijabarkan di setiap wilayah Kota/Kabupaten Pada Tahun 2020 adalah sebagaimana berikut: 1) Kabupaten Sleman: 3588 Transaksi, 2) Kota Yogyakarta: 1573 Transaksi, 3) Kabupaten Bantul: 1297 Transaksi, 4) Kabupaten Kulon Progo: 35 Transaksi dan 5) Kabupaten Gunungkidul: 0 Transaksi. Total transaksi yang terjadi di tahun 2020 adalah 6.493, sedangkan total transaksi 2021 adalah 62.130. Tentu terdapat kemajuan yang sangat pesat dari SiBakul Jogja terutama dalam fitur MarketHub dan Galeri Pasar Kotagede YIA. Jarak ekspedisi pengiriman juga bervariasi di mana jarak terdekat adalah 0,84 KM, jarak terjauh adalah 38,55 KM sehingga rerata jarak pengantaran adalah 10,25 KM. Sebagaimana pada [Tabel 1](#).

**Tabel 1.** Daftar Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara SiBakul Jogja dengan Pihak Ketiga

No.	Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Nomor PKS	Tanggal Kerja Sama	Ruang Lingkup
1	Java Parama Niaga (JPN) dengan KiriminAja	01.001/SSS-BKL/I/2021	22 Januari 2021 – 31 Desember 2021	Service Penjemputan atau Pengambilan Paket.
2	Diskop UKM DIY, Universitas Gadjah Mada dan Kamar Dagang Indonesia DIY	119.9984/2020	3 Juli 2020 – 3 Juli 2022	Klasifikasi Potensi KUMKM, Pengembangan Markethub dan <i>marketplace</i> , Pelatihan dan pendampingan KUMKM, Pengembangan produk dan jejaring pemasaran, pengembangan teknologi

No.	Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Nomor PKS	Tanggal Kerja Sama	Ruang Lingkup
3	Java Parama Niaga (JPN) dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gofood)	N/A	1 Maret 2021 – 31 Desember 2021	dan pemantauan dan evaluasi. Tarif Free-Ongkir bagi SiBakul Jogja Markethub.
4	Grabfood, Grabmart dan Java Parama Niaga (JPN)	N/A	19 Oktober 2020 – 31 Desember 2020	Tarif Free-Ongkir bagi SiBakul Jogja Markethub.
5	PT. JogjaKita Multi Andalan dengan Java Parama Niaga	N/A	1 Maret 2021 – 31 Mei 2021	Tarif Free-Ongkir bagi SiBakul Jogja Markethub.
6	Diskop UKM DIY dengan PT. Angkasa Pura Retail	119/5330/2020	24 Maret 2020	Perjanjian Sewa dan Revenue Share untuk Gallery Beringharjo di Bandara YIA.
7	Penyerahan QRIS BPD DIY kepada SiBakul Jogja	N/A	N/A	QRIS bagi UMKM.
8	BPD DIY	N/A	N/A	Kartu mitra SiBakul Jogja.
9	BNI	N/A	N/A	Kartu mitra SiBakul Jogja dalam bentuk Tap-Cash.

Sumber: Berbagai Sumber Dokumen, Data Diolah Tahun 2022

Koperasi JPN yang bertugas untuk melaksanakan kolaborasi kemudian mengembangkan sayapnya dengan menggandeng beberapa mitra seperti KirimInAja, Universitas Gadjah Mada, Kamar Dagang Indonesia DIY, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gofood), Grabmart dan PT. Angkasa Pura Retail. Oleh karena itu, peneliti merangkum setidaknya terdapat beberapa kucuran dana yang berfungsi dalam peningkatan kualitas SiBakul Jogja di antaranya: a) Dana operasional dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY sebanyak: Rp100 juta, b) Hibah Operasional SiBakul Jogja oleh Sekretariat Presiden RI sebanyak Rp250 Juta dan c) Hibah operasional SiBakul Jogja oleh DPRD Provinsi DIY sebanyak Rp1,2 Miliar untuk Tahun Anggaran 2021. Sebagai sebuah platform, kucuran dana tersebut menjadi tantangan pengelolaan *business driven* yang diarahkan untuk menunjang peningkatan SiBakul Jogja. Dikarenakan *platform* ini digunakan tidak untuk mendapatkan kekayaan secara perusahaan (instansi) maka *business driven* lebih diarahkan terhadap peningkatan keuntungan dan kesejahteraan UMKM di bawah SiBakul Jogja. Sistem pemantauan juga dapat dilihat pada [Tabel 2](#)

**Tabel 2.** Sistem Pemantauan/Monev SiBakul Jogja

No.	Sistem Pemantauan/Monev SiBakul Jogja
1	Klastering Koperasi dan UMKM Pemantauan klastering koperasi dan UMKM untuk mengetahui kesehatan dan kualitas koperasi serta peningkatan kelas pembinaan dari UMKM. Aplikasi SiBakul Jogja telah dilengkapi dengan data klaster tersebut sehingga dengan mudah dapat memantau perkembangan klastering koperasi dan UMKM.
2	Pelaporan Pelaporan tentang data koperasi dan UMKM serta pelaporan tentang kondisinya (sebaran, klastering, gender dll.) dapat dilihat secara <i>update</i> setiap hari melalui aplikasi dan aplikasi juga menyediakan laporan kondisi setiap semester dan akhir tahun.
3	Monitoring dan Evaluasi Untuk mengevaluasi data yang tersaji dalam aplikasi yang sampai saat ini masih dalam bentuk tabel angka, sedang terus dikembangkan agar data tersebut disajikan dalam bentuk grafik berseri secara periodik setiap semester sehingga dapat digunakan secara mudah untuk evaluasi oleh para <i>stakeholder</i> yang mempunyai <i>username</i> dan <i>password</i> serta beberapa data yang dapat disajikan untuk publik.
4	Bentuk pemantauan, evaluasi serta pelaporan akan terus dikembangkan dengan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan agar memenuhi kebutuhan berbagai pihak,

No.	Sistem Pemantauan/Monev SiBakul Jogja
	misalnya Badan Pusat Statistik, perbankan maupun pengambil kebijakan lainnya.

Sumber: Laporan Akhir SiBakul Jogja, Data Diolah Tahun 2022

### **Keterlibatan Masyarakat (*Human Focused*) Guna Menyukseskan SiBakul Jogja**

Partisipasi merupakan hal yang sangat penting guna melibatkan masyarakat dalam setiap proses baik itu dalam hal kebijakan ataupun inovasi (Elu et al., 2021). Dengan adanya partisipasi, maka inovasi tidak hanya berguna bagi pihak pemerintah saja tetapi bagi masyarakat (Hadawiya et al., 2021). Sama halnya dengan SiBakul Jogja, sebagai terobosan inovasi, maka perlu untuk melibatkan masyarakat dalam seluruh kegiatan yang diberikan oleh Diskop UKM DIY terkhusus bagi para UMKM. Diskop UKM DIY melakukan sosialisasi melalui tim yang tersebar ke beberapa daerah di Provinsi DIY dengan melaksanakan kegiatan seperti seminar, pendidikan dan pelatihan. Kegiatan pembinaan UMKM dibagi menjadi beberapa kelas binaan di antaranya: 1) Kelas Binaan 1: 281.943 UMKM, 2) Kelas Binaan 2: 1.833 UMKM dan 3) Kelas Binaan 3: 33 UMKM. Sepanjang tahun 2020-2021 terdapat 24 kali kegiatan dengan jumlah Peserta mencapai 3.108 UMKM yang menghasilkan *output* ke beberapa kelas pembinaan, yakni: 1) Kelas Pembinaan 1: 1.748 UMKM, 2) Kelas Pembinaan 2: 1.155 UMKM dan 3) Kelas Pembinaan 3: 205 UMKM.

Pada beberapa kesempatan juga dilaksanakan kegiatan yang lain seperti bazar dan pameran yang aktif dilaksanakan baik itu melalui virtual maupun secara *offline*. SiBakul Jogja rutin melaksanakan kegiatan pembinaan dari tahun 2020-2021 sebagaimana berikut: 1) Promosi dan Pemasaran: 2 Kegiatan dengan total peserta 2.606, 2) Pelatihan Kompetensi: 18 Kegiatan dengan total peserta 609 dan 3) Sosialisasi Kebijakan: 3 Kali dengan 73 peserta. Walaupun pendampingan dilaksanakan, sayangnya kegiatan tersebut belum dapat diikuti oleh UMKM SiBakul Jogja secara luas dan menyeluruh sehingga perlu untuk ditingkatkan lagi. Kegiatan pameran juga aktif dilaksanakan, pada tahun 2019 di saat SiBakul Beringharjo beralih menjadi SiBakul Jogja terdapat 1 kali pameran, yakni pada tanggal 24-25 Oktober 2019 di Rumah Dinas Bupati Sleman dihadiri oleh 80 UMKM. Selanjutnya, pada tahun 2020 dimasa Pandemi COVID-19 dilaksanakan Pameran Virtual dari tanggal 24-26 September 2020 di *Youtube* dengan dihadiri oleh 30 UMKM. Terakhir, dilaksanakan Pameran secara *offline* yang dilaksanakan pada tanggal 3-5 Desember 2021 yang digelar di Malioboro Mall dan dihadiri sejumlah 68 UMKM dari berbagai bidang seProvinsi DIY.

Informasi mengenai pelatihan dan pameran dikomunikasikan melalui grup WhatsApp. Grup WhatsApp seperti tertera pada gambar di atas juga memiliki fungsi untuk mendaftarkan produk-produk mereka dalam mengikuti program *free ongkir*. Para UMKM yang menjadi narasumber dalam penelitian ini juga menyatakan bahwasanya respons dari tim SiBakul Jogja apabila terdapat informasi dan kendala juga terkesan responsif walaupun terdapat beberapa kali dinyatakan juga memiliki respons yang lamban. Apabila SDM untuk CS sangat kurang seperti yang terjadi di tahun 2020, maka akan sangat berdampak baik itu bagi UMKM dan bagi *customer*. Oleh karena itu, SiBakul Jogja sebagai salah satu terobosan dari Diskop UKM DIY secara umum partisipatif dalam melibatkan masyarakat dan tentunya UMKM di Provinsi DIY. SiBakul Jogja tidak hanya merupakan wadah bagi UMKM untuk mendapatkan pelatihan dan seminar saja, melainkan juga menyediakan wadah untuk bertransaksi dan juga melibatkan masyarakat agar saling mendukung. Walaupun, melihat dari beberapa problematika di atas SiBakul Jogja masih tetap dan perlu untuk berprogres karena platform ini menjadi salah satu jawaban dari kegelisahan masyarakat akan sistem yang dapat berdampak secara langsung bagi mereka.

### **Pelaksanaan Prinsip *Based on Quick Wins* terhadap Perkembangan SiBakul Jogja**

Prinsip *based on quick wins* ini memiliki makna bahwa kesuksesan yang diraih secara cepat dapat menjadi dorongan untuk memberikan Inovasi yang lebih baik ke depannya (Zahra et al., 2022). Pembuatan inovasi SiBakul Jogja menjadi salah satu gebrakan penting tidak hanya bagi Diskop UKM DIY namun bagi Provinsi DIY. Hal ini dikarenakan melalui adanya SiBakul Jogja, maka seluruh kegiatan bagi UMKM yang sebelumnya tidak terpusat menjadi lebih terpusat melalui 1 pintu, yakni

SiBakul Jogja. Mengumpulkan UMKM dan mendata mereka kemudian megklasterkan menjadi beberapa kelas belum sepenuhnya dilakukan sebelum adanya SiBakul Jogja. Kecepatan dari perubahan yang sebelumnya belum terpusat menjadi terpusat tentu tidak dapat dilaksanakan secara sendiri, melainkan perlu dilaksanakan secara bersama-sama (*collaborative governance*). SiBakul Jogja lahir dari sebuah keresahan dari masyarakat yang membutuhkan terobosan serta inovasi yang dapat dirasakan bagi mereka secara langsung. Hasilnya, saat ini para UMKM mulai mengetahui serta memanfaatkan SiBakul Jogja sebagai salah satu wadah yang dipercaya untuk menambah serta menyebarkan produk mereka (Pertiwi & Darumurti, 2021). Adapun untuk mendukung terciptanya SiBakul Jogja berbasis keputusan yang cepat dan terukur ini, maka peneliti perlu membahas beberapa luaran-luaran yang diharapkan untuk mendongkrak UMKM di Provinsi DIY. Sebuah inovasi tentu memerlukan target-target luaran yang akan dicapai oleh SiBakul Jogja di masa yang akan datang. Beberapa hal di atas menjadi sangat krusial dikarenakan inovasi SiBakul Jogja lahir dari sebuah analisis yang lama oleh keluhan-keluhan dan permasalahan koperasi dan UMKM di Provinsi DIY.

Respons kurang luas dan cepatnya proses pengiriman dan terbatasnya ekspedisi menjadi kendala pada tahun 2020 (awal operasional SiBakul Jogja). Seiring berjalannya waktu, SiBakul Jogja mengklaim mampu mengirimkan produknya secara nasional pada tahun 2022 dengan gratis *ongkir* melalui fitur *markethub*. Terobosan tersebut juga merupakan salah satu bukti bahwa SiBakul Jogja berusaha menambah kenyamanan bagi UMKM dan *customer*. Penambahan armada ekspedisi tentu sangat berhubungan dengan peningkatan kapasitas transaksi dari SiBakul Jogja. Harapan utamanya adalah untuk meningkatkan angka pengiriman dan transaksi di setiap harinya. Armada pengiriman yang sering digunakan oleh mitra UMKM pada tahun 2020 adalah Grab dengan total 5727 transaksi hanya dalam beberapa bulan saja, sedangkan Gojek adalah 1184 transaksi. Sedangkan, pada tahun 2022 terdapat penambahan kerja sama untuk merespons dengan cepat tanggapan masyarakat agar dapat menikmati fasilitas gratis *ongkir* di seluruh Indonesia. Pihak SiBakul Jogja kemudian bekerja sama dengan Gojek (Gofood), Grab, JogjaKita dan lain sebagainya. Tahun 2022, beberapa armada meningkat secara pesat sejak awal tahun hingga akhir tahun. Perincian transaksi yang berhasil direkap oleh tim SiBakul Jogja di antaranya: a) Grab: 28.026, b) Gojek: 26.912, c) KirimAja: 1.613, d) JogjaKita: 645, e) PT. POS Indonesia: 4.934. Perbandingan serta pelaksanaan perbaikan secara cepat dilakukan dari hari ke hari dengan bekerja sama kepada beberapa pihak terkait sehingga memberikan hasil yang positif. Tujuan serta harapan masyarakat juga tercapai walaupun masih terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaannya.

Belum lagi juga permasalahan *website* yang segera ditangani oleh SiBakul Jogja. Tampilan situs web SiBakul Jogja dikritik oleh beberapa UMKM dikarenakan bentuk yang masih kuno dan belum menarik. Secara cepat, SiBakul Jogja mengubah serta menampilkan tampilan yang lebih baru dan lebih responsif. Beberapa UMKM juga mengaku dalam wawancaranya bahwa mereka terkejut melihat tampilan *website* yang berubah dan menjadi baru. Perubahan untuk mendapatkan kemenangan yang cepat diupayakan secara maksimal oleh SiBakul Jogja. Walaupun tidak semua aspek dapat diperbaiki dengan sempurna seperti belum dibuatnya aplikasi, alur pemesanan yang membingungkan, tetapi pemerintah berusaha memperbaiki sistemnya secara berkala. Pengambilan keputusan secara cepat dan memenangkan sebuah inovasi perlu menjadi roh utama dari Diskop UKM DIY agar selalu berbenah melalui SiBakul Jogja. Berikut akselerasi koperasi dan UMKM dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Akselerasi Koperasi dan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya SiBakul Jogja

Akselerasi SiBakul Jogja		
No.	Sebelum SiBakul Jogja	Sesudah SiBakul Jogja
1	Data UMKM hanya dalam data agregat dan detail tidak <i>terupdate</i> .	Data UMKM menjadi lebih detail di SiBakul Jogja.
2	Pemeringkatan dan penilaian kesehatan belum secara menyeluruh.	Terdapat pemeringkatan dan penilaian kesehatan koperasi dan UMKM.
3	Koperasi belum patuh terhadap skema Permen	SiBakul Jogja membuka peluang untuk



Akselerasi SiBakul Jogja		
No.	Sebelum SiBakul Jogja	Sesudah SiBakul Jogja
	19/2015 tentang RAT.	mendukung Permen 19/2015 agar koperasi patuh dan tertib.
4	Banyak koperasi belum tertib laporan triwulan.	Laporan triwulan diinput secara rutin melalui SiBakul Jogja sehingga mengurangi pertemuan fisik.
5	Usaha Mikro lebih banyak daripada Usaha Kecil dan Menengah.	Upaya peningkatan kelas UMKM “UMKM Naik Kelas” melalui pelatihan dan pendampingan.
6	Pembagian skala usaha yang belum detail.	Skala usaha diberikan berdasarkan penilaian dan diinput ke dalam SiBakul Jogja.
7	Pembinaan UMKM yang masih belum terstruktur, belum sesuai dengan kebutuhan dan bersifat umum.	Pembinaan UMKM diklasterisasikan berdasarkan kebutuhan para UMKM sehingga tepat sasaran.
8	Rendahnya pengetahuan UMKM terhadap <i>digital marketing</i> .	Pendidikan dan Pelatihan terhadap penggunaan dan pemanfaatan SiBakul Jogja serta <i>digital marketing</i> secara rutin.

Sumber: Hasil Wawancara, Data Diolah 2022

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perubahan dilakukan SiBakul Jogja secara cepat. Melalui SiBakul Jogja pendataan koperasi dan UMKM dilakukan dengan lebih mudah. Peneliti juga menilai bahwa Diskop UKM DIY melalui SiBakul Jogja mampu memiliki keputusan yang cepat dan tepat, bahkan sebelum keadaan Pandemi COVID-19 sudah tercipta *blueprint* untuk kondisi dan arah SiBakul Jogja untuk masa yang akan datang.

### Pelaksanaan Prinsip *Systematic and Adaptive Approach* SiBakul Jogja

Langkah-langkah sistematis dan adaptif dalam mewujudkan Inovasi SiBakul Jogja telah ditempuh dengan menggunakan rencana aksi Rajutan SiBakul Jogja. Dalam rencana aksi tersebut terdapat beberapa langkah yang menjadi patokan dalam proses penyusunan dan pemberian keputusan guna melancarkan kegiatan dan memberikan rujukan arah yang jelas terkait bagaimana seharusnya yang Diskop UKM DIY lakukan untuk mewujudkan SiBakul Jogja. Tepatnya, ada 7 langkah yang menjadi rumusan sistematis dan adaptif terhadap kebutuhan Masyarakat oleh Diskop UKM DIY untuk merumuskan SiBakul Jogja sebagaimana [Gambar 3](#).



**Gambar 3.** Alur Sistematis Pelaksanaan SiBakul Jogja

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022

**Langkah Pertama**, dilakukan dengan upaya memperbaiki sistem pendataan dengan menyeragamkan data menjadi satu data koperasi dan UKM di Provinsi DIY. Melalui penyeragaman tersebut mempermudah Diskop UKM DIY memantau serta menilai seberapa jauh UMKM dan koperasi

di DIY dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Penyeragaman data koperasi sudah dilaksanakan dengan terkumpulnya 1.822 koperasi dengan perincian 1.544 koperasi aktif dan 278 koperasi pasif. Begitu juga melalui pendataan UMKM yang berhasil mengumpulkan sekitar 301.426 dengan 14.309 di antaranya mengikuti SiBakul Jogja. **Langkah Kedua**, dilaksanakan pembuatan aplikasi SiBakul Jogja yang hingga saat ini tidak dapat ditemukan, melainkan hanya dalam bentuk *website*. Beberapa UMKM juga mengeluhkan terkait belum terciptanya SiBakul Jogja dalam bentuk aplikasi. Memang, hambatan dalam pelaksanaan pembuatan inovasi selalu ada, melainkan Diskop UKM Provinsi DIY juga perlu memikirkan strateginya (Suluh et al., 2022). Diskop UKM DIY menyampaikan bahwa aplikasi SiBakul Jogja dalam proses pembuatan, tetapi dikarenakan yang tertera di dalam rencana aksi Rajutan SiBakul Jogja adalah dalam bentuk aplikasi, maka seharusnya pihak Diskop UKM DIY mampu membuat secara cepat dan mengubahnya dari bentuk situs web ke aplikasi.

Persamaan pendapat mengenai urgensi pembuatan aplikasi SiBakul Jogja juga ditemukan oleh peneliti. Narasumber UMKM yang berada di Kota Yogyakarta memilih agar SiBakul Jogja ini dibentuk dalam bentuk situs web dikarenakan pemesanan hingga proses pembayaran yang masih belum jelas. Sedangkan, UMKM di Sleman lebih menitikberatkan terhadap konten serta kegunaannya apabila dinilai sudah cukup dan transaksi dilaksanakan secara manual (pesan melalui CS) maka perubahan ke bentuk aplikasi tidak terlalu dipaksakan. Keduanya memiliki pendapatnya berdasarkan pengalaman yang dirasakan dalam menggunakan SiBakul Jogja, dalam hal ini peneliti tidak berpihak ke salah satu narasumber, melainkan menyarankan agar SiBakul Jogja dapat diubah ke dalam bentuk aplikasi seperti yang sudah dijanjikan di dalam Rencana Aksi SiBakul Jogja. **Langkah Ketiga**, melaksanakan sosialisasi ke Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota seProvinsi DIY terkhusus pada bidang perekonomian. Sosialisasi ini melibatkan berbagai macam pihak seperti Forum TLSP (CSR) dari BUMN dan BUMD. Kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan memberikan *username* dan *password* agar para OPD yang menghendaki menjadi admin dapat ikut berkontribusi serta membantu perkembangan operasional SiBakul Jogja. Harapannya, dengan banyaknya admin dari penggunaan SiBakul Jogja di setiap OPD Kabupaten/Kota, maka pengguna yang terdaftar ke SiBakul Jogja makin luas.

**Langkah Keempat**, dilaksanakan *entry data* bagi UMKM secara mandiri sesuai dengan situasi dan kondisi usahanya. *Entry data* SiBakul Jogja juga didukung dengan adanya Bantuan Presiden bagi UMKM sehingga Diskop UKM DIY mewajibkan masyarakat untuk mendaftarkan UMKM-nya di SiBakul Jogja sebagai salah satu syarat mendapatkan Bantuan Presiden Pelaku Usaha Mikro (BPUM). **Langkah Kelima**, usulan untuk memberikan *free-ongkir* pada fitur MarketHub. Terobosan ini tidak serta-merta diberikan, melainkan berdasar atas kondisi di tengah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan UMKM kesulitan memasarkan produknya, maka diberikanlah Inovasi mengenai *free-ongkir* MarketHub yang mewadahi UMKM untuk masuk SiBakul Jogja. Seperti yang banyak disinggung pada pembahasan sebelumnya, *free-ongkir* MarketHub pada tahun 2020 mengalami lonjakan yang baik dan respons yang positif dari beberapa Narasumber. Pada langkah keenam juga dilaksanakan klastering bagi koperasi dan UMKM terkait dengan pelatihan yang akan diberikan dikarenakan perlu adanya pembinaan yang tidak monoton dan lebih adaptif terhadap kebutuhan UMKM di SiBakul Jogja.

### **Pentingnya Keberlanjutan melalui Prinsip *Simple Design and Continous Refinement***

Pembahasan ini lebih memfokuskan bagaimana sebuah inovasi SiBakul Jogja dapat digunakan secara baik bagi masyarakat dan tentunya para pelaku UMKM untuk mendapatkan berbagai fasilitas oleh Pemerintah dan berkelanjutan. Desain yang mudah dan sederhana bagi Inovasi SiBakul Jogja menjadi syarat penting agar dapat digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Pendataan dan pemantauan kesehatan koperasi dan UMKM dilakukan secara berkala melalui situs web yang juga sangat berfungsi untuk mengukur seberapa baik dan berkembangnya UMKM di Provinsi DIY. Selain itu, untuk menciptakan pelatihan yang tepat sasaran, maka pemantauan tersebut berfungsi untuk memberikan pembagian kelas sesuai dengan kebutuhan para koperasi dan UMKM di Provinsi DIY.

UMKM yang telah mendaftarkan dirinya ke dalam SiBakul Jogja dan menikmati fasilitas *free-ongkir* memberikan berbagai macam tanggapan terkait dengan sistem yang terdapat di SiBakul Jogja dari proses pemesanan hingga pengantaran. CS memiliki peran yang sangat besar untuk mengomunikasikan terhadap para *driver* dan UMKM sehingga penggunaan situs web tidak terlalu besar di sini. Dari proses tersebut tanggapan dari masyarakat sangat beragam dikarenakan berhubungan dengan kepuasan pelanggan para UMKM yang membutuhkan proses yang cepat dan efektif. SiBakul Jogja perlu untuk mengevaluasi proses sistem dan perlu menyederhanakan sehingga kualitas dari SiBakul Jogja dapat selalu diperbaiki. Beberapa narasumber menyayangkan mengenai sistem yang digunakan di mana situs web SiBakul Jogja yang terdapat 2 fitur yang menghubungkan transaksi antara UMKM dengan masyarakat, yakni MarketHub (*online*) dan Galeri Pasar Kotagede Bandara YIA (*offline*) masih tidak jelas alurnya. Proses terkait dengan sistem pembayaran disoroti dikarenakan beberapa *customer* bingung ketika akan membayar melalui SiBakul Jogja atau secara langsung. Hubungan pembelian juga sangat jarang dilakukan melalui sistem otomatis, melainkan menggunakan manual dikarenakan UMKM hanya perlu menyetorkan dan mendaftarkan format order yang dikirimkan secara pribadi kepada UMKM dan mengirimnya ke CS untuk diproses *driver* dan *free-ongkir*-nya sebagaimana pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Jumlah Marketplace yang dimiliki UMKM di Provinsi DIY

Marketplace	Jumlah	Bantul	Gunungkidul	Kulon Progo	Sleman	Yogyakarta
Tidak Punya	259,947	61,349	53,711	35,723	59,108	31,904
Marketplace selain SiBakul Jogja	1,101	331	68	59	376	261
Lebih dari satu Marketplace	998	312	45	39	360	238
<b>Total Jumlah</b>	<b>262,046</b>	<b>61,992</b>	<b>53,824</b>	<b>35,821</b>	<b>59,844</b>	<b>32,403</b>

Sumber: Hasil Wawancara, Data Diolah tahun 2022

SiBakul Jogja tentu perlu melakukan upaya-upaya perbaikan secara terus-menerus mengingat inovasi yang diwujudkan adalah dalam bentuk *marketplace*, pendataan dan pendampingan. Mengingat banyaknya kendala yang masih terdapat di SiBakul Jogja, maka sebetulnya hal ini perlu menjadi konsentrasi utama dari tim SiBakul Jogja agar dapat berinteraksi serta menemukan jawaban dari permasalahan para UMKM. Berdasarkan data pada Tabel 6 di sana dapat terlihat bahwa UMKM tidak memiliki banyak platform/*marketplace* untuk memasarkan produknya secara *online* terutama di tengah pandemi COVID-19. Jumlah ketimpangan di atas tentunya bisa menjadi celah SiBakul Jogja agar menjadi *marketplace* yang ramah bagi UMKM. Oleh karena itu, penyederhanaan sistem dan perbaikan secara rutin tetap dilaksanakan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tidak hanya di tengah pandemi COVID-19 namun juga secara berkelanjutan.

### Kesimpulan

SiBakul Jogja merupakan Inovasi yang muncul dan diresmikan pada tahun 2019. Kehadiran SiBakul Jogja sebagai sebuah marketplace, pendataan dan pendampingan oleh Diskop UKM DIY bagi para UMKM di Provinsi DIY merupakan salah satu terobosan mengingat data UMKM yang masih tercecer dengan pendampingan serta pelatihan yang masih belum mengarah terhadap kebutuhan

UMKM. Terdapat berbagai macam fitur di dalamnya salah satunya adalah fitur MarketHub dan Galeri Pasar Kotagede YIA. Tidak hanya itu, SiBakul Jogja juga menyediakan fasilitas untuk menilai kesehatan koperasi dan UMKM yang berguna untuk memantau sejauh mana perkembangan para koperasi dan UMKM di bawah naungan SiBakul Jogja dan Diskop UKM DIY. SiBakul Jogja dituntut untuk agresif terhadap perubahan serta perbaikan agar makin dapat berguna dan berfungsi bagi masyarakat dan UMKM. Penelitian ini merefleksikan hasil melalui beberapa indikator yang digunakan melalui perspektif agile governance. Indikator prinsip good enough governance merupakan salah satu prinsip dari agile governance didapatkan hasil bahwasanya minimnya jumlah SDM mengakibatkan pengelolaan saling tumpang tindih dan tidak maksimal sehingga mengakibatkan UMKM sering terkendala lamanya respons apabila terdapat permasalahan seputar sistem di dalamnya. Sumber Daya Teknis (SDT) juga banyak disoroti dikarenakan masih minimnya alat, seperti laptop, internet yang lambat, dan ruangan yang tidak tetap.

Prinsip business driven, SiBakul Jogja perlu memastikan bahwa inovasinya dapat memberikan serta membantu peningkatan pengetahuan dan pendapatan bagi UMKM. Di sisi lain, pengelolaan teknis SiBakul Jogja juga dikolaborasikan dalam bentuk pembiayaan yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Pusat, DPRD DIY, APBD dan Dana Istimewa. Beberapa UMKM juga mengaku terbantu dengan adanya SiBakul Jogja ini baik itu dalam hal pelatihan ataupun penyediaan layanan dan fasilitasi oleh Diskop UKM DIY. Prinsip human focused dilaksanakan secara optimal. Masyarakat selalu dilibatkan dalam berbagai macam bentuk pelatihan yang disediakan oleh Diskop UKM DIY. Pembinaan koperasi dan UMKM tidak dilakukan seadanya, melainkan terdapat penilaian yang akan menentukan kelas binaan menjadi beberapa kelas sesuai dengan kebutuhan masing-masing UMKM. Komunikasi juga dilakukan secara sistematis dengan menggunakan grup WhatsApp sebagai media utamanya.

Prinsip based on quick wins menjadi salah satu hal yang perlu dimiliki oleh SiBakul Jogja. SiBakul Jogja yang sebetulnya sudah direncanakan sejak tahun 2014 dan dapat dilaksanakan pada tahun 2019 sebetulnya perlu untuk dievaluasi dikarenakan seharusnya dapat dimunculkan secara lebih cepat pada tahun-tahun sebelumnya. Walaupun kemunculannya secara target sangat jauh sekali namun masyarakat mengaku bahwasanya SiBakul Jogja menjadi salah satu inovasi yang berpengaruh bagi mereka ketimbang inovasi-inovasi pemerintah lainnya yang belum mereka rasakan. Prinsip systematic and adaptive approach, melalui langkah yang sistematis dan dengan pendekatan yang adaptif ke masyarakat di tengah pandemi COVID-19, maka SiBakul Jogja mampu mengumpulkan serta meyakinkan masyarakat untuk bergabung serta berkontribusi ke dalam SiBakul Jogja. Beberapa target seperti penyeragaman data, Pembuatan platform, sosialisasi ke OPD, entry data secara manual oleh UMKM, pengembangan fitur MarketHub free-ongkir sebagai respons pandemi COVID-19 dan klastering pembinaan UMKM dilaksanakan melalui proses yang bertahap. Prinsip simple design and continuous refinement, salah satu fitur di dalam SiBakul Jogja yang bertujuan untuk mendekatkan antara masyarakat dan UMKM, yakni MarketHub dan Galeri Pasar Kotagede YIA masih terkesan kurang responsif dan cenderung berbelit. Berdasarkan pemaparan yang diberikan dalam pembahasan melalui analisis dan pendalaman, maka SiBakul Jogja hingga saat ini belum secara sempurna melaksanakan prinsip-prinsip dan memenuhi syarat agile governance. Walaupun demikian, SiBakul Jogja sudah sebagian besar melaksanakan prinsip-prinsip agile governance. Diskop UKM DIY masih perlu untuk meningkatkan beberapa kebutuhan dasar dalam operasional SiBakul Jogja guna mendukung keberlanjutan program yang berhasil menjadi salah satu Top 45 Inovasi di Indonesia dan menjadi Nomor 1 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **Daftar Pustaka**

- Al-hamdi, R., Sakir, Suswanta, Atmojo, M. eko, & Efendi, D. (2020). *Penelitian Kualitatif: pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* (Queena Ns (ed.); 1st ed.). Pustaka pelajar.
- Alfin, A. (2021). Analisis Strategi UMKM dala Menghadapi Krisis di Era Pandemi COVID-19. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(8).

- Bahtiar, R. A. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Solusinya. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 8(10), 19024. bps.go.id. (2020). *Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pelaku Usaha*. <https://COVID-19.Bps.Go.Id/>. <https://doi.org/978-602-438-350-3>
- Elu, A., Yuwono, T., Yuningsih, T., & Afrizal, T. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Administratif di Sub Distrik Pante-Makassar. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 968–973. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.781>
- Evani, fuska sani. (2020). *Dampak COVID-19, Pendapatan UMKM di DIY Turun 80%*. Beritasatu.Com. <https://www.beritasatu.com/nasional/655435/dampak-covid19-pendapatan-umkm-di-diy-turun-80>
- Farikhah, M. T. R. (2020). Implementation of Smart Governance Concept Policy in Bantul Regency. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 129. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7809>
- Fridayani, H. D., & Chiang, L. C. (2022). Strengthening the Capacity of Government Apparatus Resources in Supporting Micro Enterprises to “Go Digital” in the Special Region of Yogyakarta. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(2), 25–35. <https://doi.org/10.24018/ejsocial.2022.2.2.230>
- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Community Participation in Village Development Planning Deliberation*. 3(September), 192–200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Hulu, V. A., Patuninno, T. R., Puspasari, D., Juniyanto, N., & Pramudita, L. T. A. (2020). Menggagas Revolusi Mental Birokrasi Melalui Konsep Competitive Agile Leadership. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 2(1), 29–37. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v2i1.8050>
- Husa, M. A. (2020). *Sudah 400 UMKM Tergabung dalam SiBakul Jogja*. Jogja.Tribunnews.Com. <https://jogja.tribunnews.com/2020/07/21/sudah-400-umkm-tergabung-dalam-sibakul-jogja>
- Kemenkopukm.go.id. (2021). *Kemenkopukm Susun 6 Indikator Strategis Adaptasi Dan Transformasi KUMKM*. Kemenkopukm.Go.Id. <https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm-susun-6-indikator-strategis-adaptasi-dan-transformasi-kumkm>
- Kurniawan, D. I., Maulana, A., Studi, P., & Pemerintahan, I. (2020). *Agile governance sebagai Bentuk Transformasi Bentuk Pemerintah Daerah*.
- Lisongwei, L. (2023). Innovative Human Resource Management Strategies During the COVID-19 Pandemic: Telecommuting Practice. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 85–89. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1391>
- Luna, A. J. H. D. O., Kruchten, P., & Mora, H. P. de. (2015). Agile Governance Theory : conceptual development. *12th Internatioal Conference on Management of Technology and Information System*, 1–22.
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Mulyanto, D. H. (2020). The Quality In Electronic Services Jogja City Government: In Case E-KTP. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 104. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7814>
- Pertiwi, A. I., & Darumurti, A. (2021). Collaborative Governance in Empowering Micro, Small, and Medium Enterprises Through SiBakul Jogja free-Ongkir During COVID-19. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 5(1), 49–65.
- Prabandari, D. S., & Atmojo, M. E. (2022). Implementasi Platfrom SiBakul Jogja Dalam Pemberdayaan Umkm Terdampak Pandemi COVID-19 Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *TheJournalish: Social and Government*, 3(3), 170–181. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3.270>
- Rivelino, R. (2022). Development of Agile Governance-Based Civil Service Police Unit Organization in DKI Jakarta Province. *Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)*, 1(02), 27–41. <https://doi.org/10.56982/journalo.v1i02.18>

- Saksono, H. (2020). INNOVATION HUB : MEDIA KOLABORASI MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH INOVATIF. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(1), 1–16.
- Sari, Y. I. (2020). Sisi Terang Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 89–94. <https://doi.org/10.26593/JIHI.V0I0.3878.89-94>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Sutopo (ed.); 1st ed.). ALFABETA.
- Suluh, D., Dewi, K., Yulianti, D. B., & Yusdiawan, I. A. (2022). An Analysis of Barriers to E-government. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 95–106. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.336>
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal De Jure*, 13(11), 24–39.
- Vernanda, R. (2019). Kesiapan Indonesia Menuju Agile Governance. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 1–6.
- Zahra, N. S. A., Suparman, N., & Alia, S. (2022). Penerapan Prinsip Agile Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(5), 6167–6178.
- Zulyani, E. P., & Meiwanda, G. (2020). Agile Government dalam Mewujudkan Birokrasi yang Berkelas Dunia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 78. <https://doi.org/10.20961/sp.v15i1.40717>